

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

Nomor Urut SOP	200.8.3.3/228/SOP/BPKAD-1/2025					
Tanggal Pembuatan	20 Juni 2025					
Tanggal Revisi						
Tanggal Efektif	TAH PRO					
Disahkan Oleh	YOSSI HERVANDI, SE, MM Pembina Tingkat I / IV.b NIP. 198208162001121004					
Nama SOP	Pengumuman					

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 1. Minimal SMA/Sederajat Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014
- 3 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- 5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 7 Peraturan Gubernur Sumsel No. 82 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 8 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD Prov Sumsel

Kualifikasi Pelaksana

- 2. Menguasai Tata Pembukuan
- 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
- 4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

- SOP Standar Maklumat Pelayanan
- SOP Standar Pengajuan Keberatan
- SOP Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi
- SOP Permintaan Informasi Publik
- SOP Pengujian Konsekuensi
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan /Perlengkapan

- 1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
- 2. Term Of Reference
- 3. Alat Tulis kantor
- 4. Jaringan Internet

Peringatan

- 1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik
- 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
- 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif

Pencatatan Dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Pengumuman

		Pelaksana			Pendukung			
No	Kegiatan	Media Pengumuman	Komponcn/ Perangkat Daerah	PPID Utama dan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun dan menetapkan informasi sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. Ketentuan dalam menyusun pengumuman: a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.			Dimulai	1.UU KIP14Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	60 menit	Konsep informasi yang diumumkan	
2	Informasi yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada pcrangkat daerah untuk diumumkan dan disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi, media sosial, portal satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi.	Selesai			2. Perangkat Keras: PC, Printer, Internet dan Storage Internal	60 menit	Informasi yang telah diberikan ijin oleh Badan Publik yang berwenang untuk diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille.	

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

YOSSI HERVANDI, SE, MM Pembina Tingkat I / IV.b NIP, 198208162001121004